

TESIS

**PEMBAGIAN WASIAT NOTARIIL YANG
TIDAK SESUAI DENGAN WARIS ISLAM**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD FUADI, S.H.

2420216310039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

BANJARMASIN

Juni 2026

**PEMBAGIAN WASIAT NOTARIIL YANG TIDAK SESUAI
DENGAN WARIS ISLAM**

Tesis

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

Muhammad Fuadi, S.H.

2420216310039

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

Tesis ini
telah diperbaiki dan disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP.19761017 200112 1 002

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP.19730402 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fuadi, S.H.
NIM : 2420216310039
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tesis : Pembagian Wasiat Notariil Yang Tidak Sesuai
Dengan Waris Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 3 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Fuadi, S.H

RINGKASAN

PEMBAGIAN WASIAT NOTARIIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN WARIS ISLAM

Oleh:

Muhammad Fuadi¹, Mispansyah²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

Hukum waris Islam (*faraid*) merupakan ketentuan yang bersumber dari nas *qat'i* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur secara mengikat pembagian harta peninggalan bagi setiap Muslim. Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, permasalahan hukum yang signifikan sering kali muncul ketika penghadap Muslim menghendaki pembuatan akta wasiat yang substansinya menyimpang dari ketentuan waris Islam, seperti memberikan wasiat kepada ahli waris tertentu tanpa persetujuan ahli waris lainnya, atau menetapkan pembagian harta yang melampaui batas sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total peninggalan sebagaimana dilarang Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fakta empiris menunjukkan bahwa akta wasiat yang menyimpang dari ketentuan tersebut sering berujung pada pembatalan: Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 misalnya telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena isinya memberikan porsi wasiat yang melampaui batas sepertiga harta tanpa persetujuan seluruh ahli waris; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menegaskan kembali prinsip *la washiyyata li warits* (tidak ada wasiat bagi ahli waris) kecuali disetujui seluruh ahli waris lainnya; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 menyatakan bahwa wasiat yang diberikan kepada sebagian ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di sisi lain, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan luas kepada Notaris untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik, sementara asas *partij autonomie* dalam Pasal 1338 KUH Perdata melindungi kebebasan kehendak penghadap. Benturan antara ketiga norma ini menempatkan Notaris pada dilema jabatan: apabila menolak permohonan tanpa dasar hukum yang kuat, Notaris berpotensi melanggar kewajiban pelayanan publik; apabila mengakomodasi kehendak penghadap yang menyimpang dari *faraid* tanpa mekanisme persetujuan yang sah, Notaris menghadapi risiko akta yang cacat materiil, rentan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, dan berujung pada pertanggungjawaban kumulatif yang mencakup dimensi perdata, administratif, dan etik. Kekaburan normatif mengenai sejauh mana Notaris dapat atau wajib menolak permohonan pembuatan akta wasiat yang menyimpang dari hukum waris Islam inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris diperbolehkan menuangkan akta wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris

¹ NIM: 2420216310039

² Pembimbing

Islam, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan hukum waris Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kenotariatan, serta dapat memberikan masukan dan pedoman kepada Notaris serta masyarakat Muslim agar mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyusunan akta wasiat sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum Islam yang berlaku.

Kebolehan Notaris dalam menuangkan akta wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris Islam harus diselesaikan melalui konstruksi antinomi hukum antara norma kewenangan Notaris dalam UUJN dan KUH Perdata di satu sisi, dengan norma materiil hukum waris Islam dalam KHI di sisi lain. Antinomi ini diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali* yang menempatkan KHI sebagai norma yang mengesampingkan ketentuan umum kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata, sehingga pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan menuangkan akta wasiat yang menyimpang dari pembagian waris Islam. Pengecualian hanya dimungkinkan apabila syarat kumulatif kebolehan bersyarat terpenuhi secara utuh, yakni seluruh ahli waris yang sah telah teridentifikasi, cakap hukum, dan secara sadar memberikan persetujuan tertulis yang bersifat sukarela melalui mekanisme *al-ijazah ba'da al-mawt* sebagaimana diatur Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI. Berdasarkan teori kepastian hukum Radbruch, akta wasiat notaris yang menyimpang dari ketentuan KHI tanpa mekanisme persetujuan yang sah gagal memenuhi ketiga nilai dasar hukum secara berjenjang: tidak adil bagi ahli waris yang hak mutlaknya terlanggar, tidak bermanfaat bagi keluarga karena memicu sengketa berkepanjangan, dan tidak memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya karena rentan dibatalkan pengadilan. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai *legal filter* yang aktif, Notaris wajib melaksanakan protokol normatif yang mencakup tiga langkah berurutan: pertama, identifikasi hukum materiil dan verifikasi kelengkapan ahli waris melalui dokumen kependudukan; kedua, pemberian penyuluhan hukum (*legal counseling*) yang komprehensif kepada penghadap Muslim mengenai batasan Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI serta prinsip *la washiiyata li warits* sebagaimana dikukuhkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018; dan ketiga, penentuan sikap yang tegas berdasarkan respons penghadap, termasuk kewajiban menolak apabila penghadap bersikeras menyimpang dari KHI tanpa persetujuan ahli waris yang sah sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris. Adapun akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam mengakibatkan: (a) akta tetap berbentuk otentik namun mengandung cacat materiil karena bertentangan dengan Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI; (b) pembatalan oleh Pengadilan Agama atas gugatan ahli waris yang dirugikan berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan konsekuensi pembagian harta kembali kepada ketentuan *faraidh*, sebagaimana ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 558

K/Ag/2017; serta (c) pertanggungjawaban Notaris secara kumulatif namun proporsional, yang meliputi tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris, tanggung jawab administratif berdasarkan Pasal 16 jo. Pasal 84 UUJN, dan tanggung jawab etik berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris apabila Notaris terbukti telah mengabaikan kewajiban bertindak saksama dalam pembuatan akta wasiat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Notaris yang telah melaksanakan prinsip *due diligence* (uji tuntas) secara wajar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakjujuran penghadap yang berada di luar kemampuan verifikasi. Ketiga dimensi pertanggungjawaban ini sejalan dengan konstruksi teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yang menegaskan bahwa tanggung jawab lahir dari kewajiban yang dilanggar dan diikuti sanksi sebagai konsekuensinya, yang dalam konteks Notaris diwujudkan dalam tiga kanal pertanggungjawaban yang dapat berlaku secara kumulatif sebagaimana diklasifikasikan oleh Ridwan H.R.

PEMBAGIAN WASIAT NOTARIIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN WARIS ISLAM

Oleh:

Muhammad Fuadi³, Mispansyah⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Waris Islam, Antinomi Hukum, Pertanggungjawaban Notaris.

Judul penelitian ini adalah Pembagian Wasiat Notariil yang Tidak Sesuai dengan Waris Islam. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah diperbolehkan Notaris menuangkan akta wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris Islam, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Rumusan masalah pertama membahas pertentangan hukum mengenai kewenangan Notaris dalam menuangkan kehendak penghadap ke dalam akta wasiat berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan asas *partij autonomie* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dengan norma materiil hukum waris Islam dalam Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta peninggalan dan melarang wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Rumusan masalah kedua membahas akibat hukum terhadap akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam, yang meliputi keabsahan akta sebagai akta otentik yang tetap mengikat namun dapat dibatalkan karena mengandung cacat materiil, kemungkinan pembatalan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta pertanggungjawaban Notaris secara kumulatif namun proporsional berdasarkan prinsip *due diligence*, yang mencakup tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab administratif berdasarkan Pasal 16 jo. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tanggung jawab etik berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

³ NIM: 2420216310039

⁴ Pembimbing

DIVISION OF NOTARIAL TESTAMENT NOT IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC INHERITANCE

By:

Muhammad Fuadi¹, Mispansyah²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Deed of Testament, Islamic Inheritance, Antinomy of Law, Notary's Responsibility

The objectives of this research are to explore and analyze whether a Notary is allowed to draft a Deed of Testament which is not in accordance with the division of Islamic inheritance, and to study and analyze the legal consequence to the Deed of Testament made by Notary which is contrary to Islamic law. Method of this study is normative legal research, with descriptive-analytical characteristic, using statute, conceptual, and case approaches, in order to find out answers to the rationales. The first rationale explores antinomy of law on the Notary's authority in drafting the principal's intention into the Deed of Testament based on Article 15 paragraph (1) of Notary Profession Act and principle of *partij autonomie* stipulated in Article 1338 of Civil Code, with material norms of Islamic inheritance law in Article 195 paragraph (2) and (3) of Islamic Law Compilation which restricts that testament is maximum one third of the inheritance property and prohibits testament to the heirs without the consent of the heirs. The second rationale deals with the legal consequence to the Deed of Testament which is contrary to Islamic law, which consists of the legality of an authentic and still binding deed but voidable because it contains material defect, possibility of revocation by Religious Court based on Article 49 letter b of Act Number 3 of 2006 concerning Religious Court, and Notary's cumulative but proportional responsibility based on the principle of *due diligence*, which covers civil liability based on Article 1365 of Civil Code, administrative liability based on 16 jo. Article 84 of Notary Profession Act, and ethical liability based on Article 3 of Notary Code of Ethics.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Translator

¹ Student Number: 2420216310039

² Supervisor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Ayahanda dan ibunda, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada ayah dan bunda saya Syakbani dan Fitriani, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orantua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindungannya, Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua;
2. Istri tercinta, Salma, pendamping hidupku yang paling setia. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, keikhlasan, kesabaran, serta dukungan luar biasa yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis di setiap langkah hingga tesis Magister ini dapat terselesaikan;
3. Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: **Pembagian Wasiat Notariil Yang Tidak Sesuai Dengan Waris Islam**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Orang Tua terkasih, Istri tercinta, segenap keluarga tercinta, rekan-rekan dan para sahabat yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Banjarmasin, 3 Juli 2026



Muhammad Fuadi, S.H

DAFTAR ISI

JUDUL	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	viii
PERSEMBAHAN	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian	50
G. Sistematika Penulisan	54
 BAB II KEWENANGAN DAN KEBOLEHAN NOTARIS DALAM MENUANGKAN AKTA WASIAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PEMBAGIAN WARIS ISLAM	56
A. Makna dan Karakteristik Wasiat yang Tidak Sesuai dengan Pembagian Waris Islam	56

B. Kebolehan Notaris Menuangkan Akta Wasiat yang Tidak Sesuai dengan Pembagian Waris Islam dalam Perspektif Kewenangan UUJN dan Kode Etik Notaris	62
 BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM.....	79
A. Keabsahan Akta Otentik dan Pembatalannya akibat Cacat Materiil terhadap Hukum Waris Islam.....	79
B. Implikasi Yuridis bagi Notaris: Tanggung Jawab Perdata, Administratif, dan Etik.....	86
C. Keseimbangan antara Perlindungan Ahli Waris dan Risiko Profesi Notaris	92
 BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA	103